RENCANA KERJA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BIKA
Alamat: Jalan Raya Bika Nomor 10 Kode Pos 78753

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bika Tahun 2025 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bika Tahun 2025 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang ada pada Kantor Kecamatan Bika.

Rencana Kerja Kecamatan Bika Tahun 2025 ini merupakan tahun ke empat dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Bika Tahun 2025 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2025, kami berhadap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2025, serta sebagai acuan untuk Pembangunan tahun selanjutnya. Terima Kasih.

Bika, Januari 2025

Camat Bika,

PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P
Pembina
NIP. 19820827 200902 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I	**PENDAHULuAN**		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	4
	1.4	Sistematika Penulisan Rencana Kerja OPD	5
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA**		6
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra OPD	6
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	6
	2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD	7
	2.4	Review Terhadap RKPD	8
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BIKA**		11
	3.1	Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	11
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja OPD	13
	3.3	Program dan Kegiatan	14
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BIKA**		18
BAB V	**PENUTUP**		19
LAMPIRAN-LAMPIRAN			

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun Penyusunan Rencana Kerja, merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD Kecamatan Bika.

Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja Kecamatan Bika mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program Pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program OPD Kecamatan Bika yang ditetapkan dalam Rencana Stategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk merencakan program kegiatan disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bika sebagai wujud dari kinerja Tahun 2024 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program Pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangka Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Bika dalam Menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republikn Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomoe 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimanatan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 71);
12. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 455 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bika Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai dokumen petrencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

- Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Bika Tahun 2025 dalam rencana program prioritas.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatn Bika yang membuat arah kebijakan di Kecamatan Bika

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memaduserasikan antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) dan untuk :

- Mesinkronisasi serta mensenergikan program dan kegiatan Kecamatan Bika Tahun 2025 dengan target dan sasaran Pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025.
- Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta sumber daya manusia.
- Mewujudkan efensiansi dan efektifitas dalam perencanan alolkasi sumber daya setra produktifitas dalam peningkatan kinerja Kecamatan Bika.
- Membuat acuan perencanaan yang membuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Bika.

1.4 Sistematika Penulisan Renja OPD

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN RENSTRA OPD
- 2.2. ANALISIS KERJA PELAYAN OPD
- 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD
- 2.4. REVIEW TERHADAP RKPD
- 2.5. PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

- 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
- 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD
- 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BIKA

BAB V PENUTUPAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2024 OPD Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu telah memberikan hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban.

Hal ini akan terlihat dalam Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bika Tahun 2024 Untuk realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, factor-faktor penyebab tidak tercapaian, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bika berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bika dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu Nilai IKM dan Predikat SAKIP.

Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Bika yang merupakan tolak ukur dari pencapaian Pembangunan di Kecamatan Bika dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah

Pusat serta pihak lain, pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kecamatan Bika sesuai Renstra Tahun 2021-2026 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu yang Dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sesuai dengan pencapaian visi, misi dan target Kabupaten Kapuas Hulu.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu Strategis dan permasalahan Pembangunan Kecamatan Bika. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan serta peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Kecamatan Bika sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan Pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Bika masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan ke depan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber daya manusia yang belum optimal
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bika, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi partisipasi Masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi Masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan, terlebih pada Pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk Upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

2. Profesionalitas pelayanan Kecamatan sebagai salah satu OPD Kecamatan Bika yang menyelengarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada Masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelengaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan Masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder yang ada di Kecamatan Bika.

2.4 Review Terhadap RKPD

Rencana ketrja Kdecamatan Bika Berdasarkan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan renja OPD se-Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan programdan kegiatan belokasi di Wilayah Kecamatan Bika.

Rancangan awal prioritas Pembangunan di Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan Pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja Pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi Masyarakat dalam Musrembang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan Pembangunan tahunan pemerintah.

Letak geografis Kecamatan Bika yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu termasuk wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehinga pertumbuhan perekonomian maupun Pembangunan mengarah ke Kecamatan Bika baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa.

Konsep Pembangunan yang berkelanjutan dan senergis mengharuskan mengarahkan dokumen-dokumen perencanaan Pembangunan untuk disusun untuk saling bersemergis. Berdasarkan konsep terdebut diharapkan bahwa

pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efesien dan senergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam review ini tersaji proses yang dilakukan yaitu mebandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengeani alasan proses tersebut dilakukan, dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kenerja Pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan partisipasi sektor swasta (Masyarakat). Sedangkan indikakator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintahan melalui berbagai sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk mencapai indiktor makro tersebut adalah sebagai berikut :

a. indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pemerintah harus focus pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks Pendidikan, Kesehatan dan daya beli Masyarakat.
b. Tingkat penganguran terbuka (TPT)
c. Jumlah Penduduk
d. Tingkat Kemiskinan
e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
f. PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan)
g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Capaian kinerja pembangunan ditingkat Kecamatan selama tahun 2023-2024 yang tercemin pada tingkat capaian indikator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh

pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, baik yang menyangkut bidang ekonomi,bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, maupun, bidang sarana dan prasarana. selain peran Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten, juga peran seluruh komponen Masyarakat, swasta dan stakeholder Pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang Tingkat pencapaian kinerja Pembangunan, diantaranya melalui program swadaya Masyarakat dengan kegiatan gotong-royong dalam hal ini yang terpenting Pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fuingsi OPD itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok Pembangunan yang dapat mempercepat laju Pembangunan yaitu harus memeperhatikan inti pokok yang akan dibangun antara lain :

a. Pembangunan Bidang Pendidikan.
b. Pembangunan Bidang Kesehatan.
c. Pembangunan Bidang Ekonomi.
d. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BIKA

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan Pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan RENSTRA, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikian di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Bika Tahun 2025 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan Pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan rencana kerja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kedudukan Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan wilayah kerja kecamatan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah, dengan Visi adalah ***“ TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL”.***

Memperhatikan visi Kabupaten Kapuas Hulu tersebut di atas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan public setiap kebijakan public beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh Masyarakat. agar setiap Keputusan/kebijakan public dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka Masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodir di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain Pembangunan berdasarkan partisipasi Masyarakat atau Pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan system informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokrasi dalam proses pengambilan Keputusan public.

Partisipasi Masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan public akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan public akan meningkatkan penerimaan Masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntantabilitas dari penyelenggaraan pelayanan public.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu selaku Perangkat Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas I Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi structural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata Kelola, pengembangan manajemen SDM aparatur dan pencapaian kinerja secara optimal.
2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan 15 SPM di daerah untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM.
3. Percepatan dan pencapaian target millinenium development goal’s.

4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Tingkat pusat dan daerah sehingga tercapai keselarasan arah dalan implementasi Pembangunan.
5. Penetapan dan penerapan system indicator kinerja utama pelayanan public yang prima, selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka mewujudkan misi Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu dijabarkan Kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional dituangkan dalam Renja Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi.

Sasaran merupakan Gambaran yang diinginkan melalui Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan dirumuskan untuk memberikan focus pada penyusunan kebijakan dan program yang dapat diukur dalam pencapaiannya.

Adapun tujuan dan sasaran serta indicator sasaran dari Kecamatan Bika adalah sebagai berikut:

TUJUAN	
Misi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas
Kegiatan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Adapun sasaran organisasi yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bika adalah:

SASARAN	
Tujuan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kegiatan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Bika
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik

Setelah menentukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut:

1. menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Menyusun program strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi.
3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi Lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan Kecamatan Bika.

Program/kegiatan yang direncakan dibiayai tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Bika Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil Analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas Pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Bika Tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas pokok dan fungsi Lembaga.
2. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan pemerintah tingjkat atasnya.
3. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
4. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah Tingkat di bawahnya.
5. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas diwilayahnya.

3.3.1 Program

Program merupakan Kumpulan kegiatan yang menggambarkan Tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalakan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Bika maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraam Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.3.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu Tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan, berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel

Program dan Kegiatan Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di kelurahan
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan peralatan rumah tangga
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Fasilitasi kunjungan tamu

		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa surat menyurat
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2025 Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dalam pencapaiannya masih sulit dilaksanakan karena perencanaan selalu tida sejalan dengan ketersediaan keuangan dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Ketidaksesuaian ini biasanya disebabkan karena Pemerintah Daerah telah mematok angka anggaran untuk tiap-tiap kecamatannya. Dengan kata lain, hampir tidak mungkin melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2025 bahkan seterusnya sesuai dengan perencanaan.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya akan terpaparkan dalam lampiran Rencana Kerja Tahun 2025 ini.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PADA KANTOR KECAMATAN BIKA

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Kantor Kecamatan Bika Tahun 2021-2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang akan ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Bika Menyusun rencana kerja Tahun 2025, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan Tahun 2025. Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Bika dan perencanaan Pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya dapat dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output rencana kerja Kecamatan Bika adalah program tahunan Kecamatan Bika yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan sasaran program Kecamatan Bika. Rencana Kerja Kecamatan Bika ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan Gambaran pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Bika, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bika untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Bika Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Bika Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Bika sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi Pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Bika Tahun 2025, maka penetapan prioritas Pembangunan yang merupakan Upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Bika diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Tentu saja masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini, namun demikian kami tetap mengevaluasi diri dan berusaha memperbaiki pada waktu yang akan dating. Demikian Rencana Kerja ini disusun sebagai media pertanggungjawaban kinerja pada Kantor Kecamatan Bika.

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bika Tahun 2025 Kabupaten Kapuas Hulu

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Rp)	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	100%	6.458.500	6.458.500	100	100%	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	1.276.649.860	1.276.649.860	100	100%	100%	100%
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	100%	72.362.500	72.362.500	100	100%	100%	100%
		Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100%	100%	6.474.500	6.474.500	100	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	12.700.000	12.700.000	100	100%	100%	100%
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	31.283.500	31.283.500	100,00	100%	100%	100%
		Penyediaan peralatan rumah tangga	100%	100%	16.309.000	16.309.000	100	100%	100%	100%
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	30.823.000	30.823.000	100	100%	100%	100%
		Fasilitasi kunjungan tamu	100%	100%	18.375.000	18.375.000	100	100%	100%	100%
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	29.306.000	29.306.000	100	100%	100%	100%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	100%	100%	6.454.000	6.454.000	100	100%	100%	100%
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	17.822.500	17.822.500	100	100%	100%	100%
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	70.575.459	70.575.459	100	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	100%	23.076.000	23.076.000	100	100%	100%	100%
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi dalam forum musyawarah perencaan pembangunan di desa	100%	100%	14.800.500	14.800.500	100	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	20.000.000	20.000.000	100	100%	100%	100%

Camat Bika,

PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P
Pembina
NIP. 19820827 200902 1 003

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bika Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026

Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasiona	IKK	Rencana Renstra Perangakat Daerah					Realisasi Capaian		Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat														
1	Predikat SAKIP	B	Predikat	CC	CC	B	B	B	CC	CC	CC	CC	B	
2	Indek Kepuas Masyarakat (IKM)	85	%	76,61	77,76	78	79,61	80,61	76,61	76,61	77,76	84,02	85,00	

Camat Bika

PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P

Pembina

NIP. 19820827 200902 1 003

Tabel 3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
Program	**Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program**	**Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	6.458.500	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	6.458.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	1.276.649.860		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	1.276.649.860	
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	72.362.500				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	72.362.500	
			Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100%	6.474.500				Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100%	6.474.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	12.700.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	12.700.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	31.283.500				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	31.283.500	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	100%	16.309.000				Penyediaan peralatan rumah tangga	100%	16.309.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	30.823.000				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	30.823.000	
			Fasilitasi kunjungan tamu	100%	18.375.000				Fasilitasi kunjungan tamu	100%	18.375.000	
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	29.306.000				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	29.306.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Penyediaan jasa surat menyurat	100%	6.454.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Penyediaan jasa surat menyurat	100%	6.454.000	

	Daerah		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	17.822.500		Daerah		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	17.822.500	
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	70.575.459				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	70.575.459	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	23.076.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	23.076.000	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	14.800.500	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	14.800.500	
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Desa/kelurahan	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Peningkatan partisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100%	20.000.000	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Peningkatan partisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100%	20.000.000	

Camat Bika,

PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P
Pembina
NIP. 19820827 200902 1 003

Tabel 4

Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Catatan Penting
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.458.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.276.649.860	
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	72.362.500	
			Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6.474.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.700.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	31.283.500	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	16.309.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.823.000	
			Fasilitasi kunjungan tamu	18.375.000	
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29.306.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Penyediaan jasa surat menyurat	6.454.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.822.500	
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	70.575.459	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	23.076.000	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	14.800.500	
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	Peningkatan partisipasi dalam forum musyawarah perencaan pembangunan di desa	20.000.000	

Camat Bika,

PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P
Pembina
NIP. 19820827 200902 1 003

Tabel 5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	100%	6.458.500	Dana Transfer Umum-DAU	Kemungkinan anggaran Tahun 2024 capaianya tidak sesuai dengan perencanaan karena dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh pemerintah daerah.	100%	6.458.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	100%	1.276.649.860	Dana Transfer Umum-DAU		100%	1.276.649.860
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		100%	72.362.500			100%	72.362.500
		Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		100%	6.474.500			100%	6.474.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	100%	12.700.000	Dana Transfer Umum-DAU		100%	12.700.000
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100%	31.283.500			100%	31.283.500
		Penyediaan peralatan rumah tangga		100%	16.309.000			100%	16.309.000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100%	30.823.000			100%	30.823.000
		Fasilitasi kunjungan tamu		100%	18.375.000			100%	18.375.000
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100%	29.306.000			100%	29.306.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	100%	6.454.000	Dana Transfer Umum-DAU		100%	6.454.000

		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100%	17.822.500			100%	17.822.500
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		100%	70.575.459			100%	70.575.459
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	100%	23.076.000			100%	23.076.000
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	100%	14.800.500	Dana Transfer Umum-DAU		100%	14.800.500
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi dalam forum musyawarah perencaan pembangunan di desa	Kab. Kapuas Hulu Kec. Bika	100%	20.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		100%	20.000.000

Camat Bika,

PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P
Pembina
NIP. 19820827 200902 1 003

Tabel 6

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bika Tahun 2025
Kabupaten Kapuas Hulu

Program	Uraian	Pagu Indikatif	Target Program
1	*2*	*3*	*4*
KECAMATAN BIKA		**1.653.470.319**	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**1.653.470.319**	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**6.458.500**	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.458.500	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**1.355.486.860**	100%
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.276.649.860	100%
	Pelaksanaan penatausahaan dan penguiian/verifikasi keuangan SKPD	72.362.500	100%
	Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6.474.500	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**138.796.500**	100%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.700.000	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	31.283.500	100%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	16.309.000	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.823.000	100%
	Fasilitasi kunjungan tamu	18.375.000	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29.306.000	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**94.851.959**	100%
	Penyediaan jasa surat menyurat	6.454.000	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.822.500	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	70.575.459	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**23.076.000**	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	23.076.000	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**20.000.000**	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh		**20.000.000**	100%
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	20.000.000	100%
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**14.800.500**	100%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			100%
	Peningkatan partisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14.800.500	100%

Camat Bika,

PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P
Pembina
NIP. 19820827 200902 1 003

Tabel 7

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 BERDASARKAN SERAPAN ANGGARAN KECAMATAN BIKA KABUPATEN KAPUAS HULU

Program	Kegiatan	Indikantor Kinerja Kegiatan	Pagu Indikatif	Realisasi	Persentase (%)	Permasalahan	Solusi/Rencana Aksi
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.458.500	6.458.500	100,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.276.649.860	1.276.649.860	100,00		
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	72.362.500	72.362.500	100,00		
		Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6.474.500	6.474.500	100,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.700.000	12.700.000	100,00		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	31.283.500	53.391.500	170,67		
		Penyediaan peralatan rumah tangga	16.309.000	16.309.000	100,00		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.823.000	30.823.000	100,00		
		Fasilitasi kunjungan tamu	18.375.000	18.375.000	100,00		
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29.306.000	29.306.000	100,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	6.454.000	6.454.000	100,00		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.822.500	17.822.500	100,00		
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	70.575.459	70.575.459	100,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	23.076.000	23.076.000	100,00		
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	14.800.500	14.800.500	100,00		
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi dalam forum musyawarah perencaan pembangunan di desa	20.000.000	20.000.000	100,00		
			1.653.470.319	1.675.578.319	101,34		

Camat Bika

PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P
Pembina
NIP. 19820827 200902 1 003

Tabel 8

PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN BIKA
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR		Lokasi	TARGET				REALISASI				KETERANGAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan untuk Menciptakan Pelayanan secara baik, profesional dan akuntabel	-	Persentase pemenuhan kualitas Pelayanan Aparatur Kecamatan	Kantor Kec. Bika	100%	100%	100%	100%	80%	83%	85%	100%	
		-	Persentase meningkatnya sarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan	Kantor Kec. Bika	70%	70%	70%	70%	50%	50%	50%	100%	
2	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan	-	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di kecamatan Bika	8 Desa	80%	80%	80%	80%	30%	30%	30%	100%	
3	Meningkatnya sistem pelayanan yang prima di kecamatan Bika yang berorientasi kepada masyarakat		Persentase informasi dan produk layanan PATEN	8 Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya pembinaan desa		Jumlah desa yang dilakukan pembinaan	8 Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Camat Bika,

PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P
Pembina
NIP. 19820827 200902 1 003